

Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik

Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd



Kelompok 4

Diah Arum Sari Nawang Ulan 2313031021

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Penganggaran Sektor Publik” dengan tepat waktu. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

Dalam penyusunan makalah ini, kami mendapatkan banyak bantuan bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr.Pujiati, M.Pd. dan Ibu Fiarika Dwi Utari, S.Pd.,M.Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang telah memberikan arahan dan bimbingan, dan rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan makalah ini.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan makalah ini di masa mendatang. Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman mengenai Akuntansi Manajemen Sektor Publik.

Bandar Lampung, 21 September 2025

Kelompok 4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	3
BAB II	5
PEMBAHASAN	5
2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik	5
2.2 Karakteristik Anggaran Sektor Publik	6
2.3 Prinsip-prinsip anggaran sektor publik.....	7
2.4 Fungsi Anggaran Sektor Publik	8
2.5 Pendekatan Penyusunan Anggaran Sektor Publik.....	11
2.6 Pentingnya Anggaran Sektor Publik	13
BAB III.....	13
PENUTUP.....	16
3.1 Kesimpulan.....	16
3.2 Saran	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17
STUDY KASUS.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penganggaran sektor publik merupakan instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan karena berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, serta sarana akuntabilitas publik. Anggaran tidak hanya mencerminkan prioritas pemerintah, tetapi juga menunjukkan bagaimana dana masyarakat dikelola untuk kepentingan umum. Dengan adanya anggaran, pemerintah dapat menyeimbangkan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.

Di era modern, transparansi dan akuntabilitas anggaran menjadi tuntutan utama masyarakat. Penyusunan anggaran bukan sekadar proses teknis, melainkan juga melibatkan aspek politik, sosial, dan ekonomi. Hal ini menjadikan anggaran sektor publik sebagai salah satu indikator kinerja pemerintah dalam mewujudkan good governance. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai penganggaran sektor publik sangat penting bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi agar mampu menilai sejauh mana pemerintah menjalankan fungsi anggaran secara efektif, efisien, dan berkeadilan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari anggaran sektor publik?
2. Apa saja karakteristik dan prinsip-prinsip anggaran sektor publik?
3. Apa fungsi utama anggaran sektor publik dalam tata kelola pemerintahan?
4. Bagaimana pendekatan penyusunan anggaran sektor publik?
5. Mengapa anggaran sektor publik memiliki peran penting dalam pembangunan dan akuntabilitas pemerintah?

1.3 Tujuan

1. Menjelaskan pengertian anggaran sektor publik.
2. Mendeskripsikan karakteristik serta prinsip-prinsip anggaran sektor publik.

3. Menguraikan fungsi-fungsi utama anggaran sektor publik.
4. Menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran sektor publik.
5. Menjelaskan pentingnya anggaran sektor publik dalam mewujudkan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik adalah salah satu instrumen utama dalam tata kelola pemerintahan yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, sekaligus mengendalikan berbagai program dan aktivitas pemerintah. Menurut Mardiasmo (2021:61), anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter untuk periode tertentu, yang digunakan sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana masyarakat. Definisi ini menegaskan bahwa anggaran bukan sekadar dokumen administratif, melainkan juga sarana untuk memastikan bahwa pengelolaan uang publik berjalan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, Governmental Accounting Standards Board (GASB) dalam Indrayani (2022:34) mendefinisikan anggaran sebagai suatu rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan serta sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai pengeluaran tersebut, dalam kurun waktu tertentu. Dari definisi ini terlihat bahwa anggaran publik bersifat prospektif, karena berorientasi pada masa depan dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program kerja pemerintah.

Secara umum, dapat dipahami bahwa anggaran sektor publik adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, serta akuntabilitas publik. Anggaran menghubungkan antara kebutuhan masyarakat yang sangat banyak dengan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas, sehingga harus disusun secara hati-hati agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif.

2.2 Karakteristik Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2021:63) dan Indrayani (2022:37), anggaran sektor publik memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dengan anggaran di sektor swasta, di antaranya:

1. Dinyatakan dalam satuan moneter

Semua perencanaan baik pendapatan maupun belanja harus diukur dengan satuan uang. Walaupun kegiatan yang dilakukan berupa barang atau jasa, nilai tersebut tetap dikonversikan dalam bentuk moneter agar dapat dibandingkan, diukur, dan dievaluasi secara objektif.

2. Disusun untuk periode tertentu

Anggaran sektor publik biasanya berlaku untuk periode satu tahun (tahun anggaran). Hal ini penting agar pemerintah memiliki pedoman yang jelas mengenai target penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu, sekaligus memudahkan proses evaluasi tahunan.

3. Memuat estimasi pendapatan dan belanja

Anggaran selalu berisi proyeksi mengenai sumber pendapatan (misalnya pajak, retribusi, dana transfer) serta rencana pengeluaran (misalnya belanja pegawai, belanja barang, belanja pembangunan). Dengan demikian, anggaran menjadi alat untuk menyeimbangkan kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia.

4. Berfungsi sebagai alat perencanaan

Anggaran menjelaskan program dan kegiatan yang akan dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, serta biaya yang dibutuhkan. Dengan adanya anggaran, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kapasitas fiskalnya.

5. Berfungsi sebagai alat pengendalian

Setelah disahkan, anggaran menjadi standar pembanding dengan realisasi. Jika terjadi penyimpangan, maka dapat dilakukan evaluasi dan koreksi kebijakan. Hal ini membuat anggaran berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kinerja pemerintah.

6. Bersifat akuntabel kepada publik

Karena dibiayai oleh uang masyarakat, setiap rupiah yang digunakan pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Oleh karena itu, anggaran publik menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

7. Mengandung aspek politik

Penyusunan anggaran sektor publik tidak hanya teknis, tetapi juga melibatkan proses politik. Eksekutif (pemerintah) menyusun rancangan anggaran, kemudian legislatif (DPR/DPRD) membahas dan menyetujui. Proses ini sering kali dipengaruhi oleh perdebatan mengenai kepentingan, aspirasi masyarakat, serta prioritas pembangunan.

2.3 Prinsip-prinsip anggaran sektor publik

Menurut Haryanto dan rekan-rekan (2007) dalam Majid (2019), terdapat sejumlah prinsip penting yang menjadi pijakan dalam penyusunan anggaran sektor publik, yaitu:

1. Otorisasi oleh Legislatif

Sebelum pihak eksekutif dapat membelanjakan dana publik, anggaran harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari lembaga legislatif. Ini berarti, anggaran publik tidak dapat dijalankan tanpa adanya otorisasi resmi dari legislatif.

2. Komprehensif

Anggaran perlu disusun secara terbuka, mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Apabila terdapat dana yang tidak tercantum dalam anggaran resmi, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi dan kelengkapan.

3. Keutuhan Anggaran

Setiap pemasukan dan pengeluaran negara harus tercantum dalam satu dokumen anggaran yang utuh. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pengawasan, menghindari praktik manipulatif, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

4. Penganggaran Non-diskresioner (Nondiscretionary Appropriation)

Terdapat jenis pengeluaran yang wajib dilakukan oleh pemerintah karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau merupakan bagian dari komitmen masa lalu. Meskipun kondisi keuangan sedang sulit, jenis anggaran ini tidak dapat dikurangi ataupun ditunda, sehingga perlu dikelola secara efisien, efektif, dan ekonomis.

5. Berkala (Periodik)

Penyusunan anggaran dilakukan dalam periode waktu tertentu secara rutin, baik setiap tahun maupun untuk jangka waktu lebih panjang (multiyear).

6. Ketepatan (Akurat)

Dalam penyusunan anggaran, estimasi harus dibuat dengan cermat agar tidak terjadi pemborosan atau ketidakefisienan. Perkiraan penerimaan tidak boleh dibuat terlalu rendah, dan belanja tidak boleh terlalu tinggi. Cadangan tersembunyi sebaiknya dihindari demi keakuratan perencanaan.

7. Kejelasan

Anggaran harus disusun dengan struktur dan bahasa yang jelas, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat umum.

8. Transparansi Publik

Penyusunan anggaran harus dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat secara luas, guna menjamin keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengawasan.

2.4 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2009) dalam Majid (2019) menguraikan beberapa fungsi penting dari anggaran di sektor publik, di antaranya:

1. Alat Perencanaan (planning tool)

Anggaran berfungsi sebagai alat strategis bagi manajemen dalam merancang langkah-langkah untuk mencapai tujuan organisasi. Di sektor publik, anggaran dirancang untuk merencanakan program, besaran biaya yang dibutuhkan, serta target yang ingin dicapai. Fungsi ini mencakup:

- a) Menyusun arah kebijakan serta sasaran yang sejalan dengan visi dan misi organisasi

- b) Menyediakan kerangka kerja bagi rencana kegiatan serta potensi sumber pendanaan alternatif
 - c) Menentukan alokasi dana terhadap program dan kegiatan tertentu
 - d) Menetapkan indikator kinerja serta tolok ukur pencapaian strategi.
2. Alat Pengendalian (Control Tool)
 Anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk mengontrol jalannya aktivitas pemerintah. Dengan anggaran, proses pengeluaran negara dapat diawasi secara efektif untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, serta pencegahan terhadap penyalahgunaan dana. Hal ini juga memberi kepercayaan kepada legislatif bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi.
 3. Alat kebijakan fiskal (fiscal politik)
 Anggaran digunakan sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal pemerintah, berperan menjaga kestabilan ekonomi nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, anggaran juga bertujuan untuk mengarahkan, memfasilitasi, dan menyinergikan berbagai aktivitas ekonomi agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara optimal.
 4. Alat Politik (Political Politic)
 Anggaran merefleksikan hasil kesepakatan politik antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan prioritas pembangunan serta besaran dana yang dialokasikan. Dalam konteks ini, penyusunan anggaran membutuhkan komitmen politik, kemampuan negosiasi, serta manajemen publik yang memahami prinsip-prinsip keuangan negara. Jika implementasi anggaran menyimpang dari rencana yang telah disetujui, hal tersebut dapat mengganggu kredibilitas pemerintahan dan efektivitas manajemen publik.
 5. Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and Communication Tool)
 Karena disusun oleh seluruh unit kerja pemerintah, anggaran berfungsi mengkoordinasikan antarbagian agar bekerja secara sinergis. Anggaran yang terstruktur dengan baik memungkinkan identifikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program. Selain itu, anggaran menjadi media komunikasi antarunit agar seluruh bagian organisasi memiliki pemahaman yang sama terkait tujuan dan strategi yang dijalankan.

6. Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement Tool)

Anggaran menjadi dasar evaluasi pencapaian kinerja unit kerja di sektor publik. Dengan merujuk pada indikator yang ditetapkan, dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah terlaksana sesuai rencana. Evaluasi ini menjadi dasar perbaikan di masa mendatang.

7. Alat Motivasi (Motivation Tool)

Anggaran dapat memacu semangat kerja apabila target yang ditetapkan bersifat realistis namun tetap menantang. Penyusunan target anggaran yang proporsional akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja dalam organisasi.

8. Alat Menciptakan Ruang Publik (Public Sphere)

Penyusunan anggaran publik harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi sipil, dan lembaga non-pemerintah. Sering kali, kelompok masyarakat tertentu berupaya memengaruhi arah kebijakan anggaran agar sesuai dengan kepentingannya. Di sisi lain, kelompok rentan seperti pengangguran atau masyarakat marjinal seringkali tidak memiliki akses untuk menyuarakan kepentingannya. Apabila aspirasi mereka tidak tersalurkan secara formal, bisa terjadi tindakan perlawanan sosial seperti demonstrasi atau bentuk ketidakpuasan lainnya.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, anggaran publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- a) Sebagai pernyataan resmi atas kebijakan pemerintah
- b) Sebagai alat penetapan target fiskal yang mencerminkan keseimbangan antara pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan
- c) Sebagai dasar pengendalian keuangan yang memiliki kekuatan hukum
- d) Sebagai acuan evaluasi terhadap kinerja pemerintah
- e) Menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran.

2.5 Pendekatan Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Menurut Sujarweni dan rekan (2015, hlm. 50), terdapat dua pendekatan utama yang digunakan dalam penyusunan anggaran sektor publik, yaitu:

1. Anggaran Tradisional

Pendekatan ini masih umum digunakan, khususnya di negara-negara berkembang. Ciri-ciri utama dari pendekatan tradisional antara lain:

- a) Cara Penyusunan anggaran: dilakukan dengan menyesuaikan anggaran tahun sebelumnya, baik melalui penambahan maupun pengurangan, tanpa melakukan evaluasi mendalam. Kelemahannya adalah potensi terjadinya kesalahan yang terus berulang dan tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan yang aktual.
- b) Struktur Anggaran disusun: berdasarkan daftar item penerimaan dan pengeluaran. Model ini tidak fleksibel dalam menyesuaikan dengan kebutuhan masa kini, karena item yang sudah tidak relevan tetap dicantumkan. Akibatnya, evaluasi kinerja hanya berfokus pada kepatuhan terhadap penggunaan anggaran, bukan pada efektivitas atau hasilnya.
- c) Cenderung Sentralistik Penyusunan anggaran: dilakukan secara terpusat oleh otoritas tertentu. Kurangnya informasi yang memadai dari tingkat bawah menyebabkan pengukuran kinerja menjadi tidak optimal dan menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan aktual dan anggaran yang disediakan.
- d) Bersifat Spesifikasi: Anggaran dipisahkan secara tegas antara belanja operasional dan belanja modal, tanpa adanya pendekatan holistik dalam melihat keseluruhan kebutuhan organisasi.
- e) Tahunan Anggaran: dibuat dalam siklus satu tahun. Untuk proyek-proyek investasi jangka panjang, periode ini dianggap terlalu pendek dan dapat membuka celah terjadinya praktik tidak sehat seperti korupsi dan kolusi.
- f) Menggunakan Prinsip Anggaran Bruto: Dalam pendekatan ini, anggaran disusun berdasarkan jumlah kotor (bruto), tanpa

memperhitungkan pengurangan tertentu sehingga menyulitkan analisis secara sistematis.

2. Anggaran New Public Management (NPM)

Berbeda dengan pendekatan tradisional, pendekatan NPM lebih modern dan terstruktur. Menurut Mahsum dan rekan (2013), pendekatan ini memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- a) Komprehensif dan Komparatif: Anggaran disusun secara menyeluruh dan memungkinkan perbandingan antar program atau satuan kerja.
- b) Terintegrasi dan Lintas: departemen Perencanaan anggaran dilakukan secara terpadu antar departemen, bukan dalam silo-silo yang terpisah.
- c) Pengambilan Keputusan Rasional: Setiap keputusan anggaran didasarkan pada logika, data, dan analisis mendalam, bukan semata-mata pada kebiasaan atau tekanan politik.
- d) Berjangka Panjang: Perencanaan anggaran tidak terbatas pada satu tahun, melainkan mencakup horizon waktu yang lebih panjang agar lebih strategis.
- e) Tujuan Spesifik dan Prioritas yang Jelas: Anggaran dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dengan penentuan skala prioritas yang terukur.
- f) Analisis Biaya dan Manfaat: Anggaran memperhitungkan keseluruhan biaya dan manfaat, termasuk biaya peluang (opportunity cost), agar setiap alokasi dana dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis.
- g) Berorientasi pada Input, Output, dan Outcome: Proses anggaran tidak hanya melihat pada besaran dana yang masuk dan keluar, tetapi juga hasil dan dampak dari penggunaan anggaran tersebut.
- h) Pengawasan Kinerja: Terdapat sistem monitoring yang memungkinkan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran.

Teknik-Teknik Dalam Pendekatan NPM

Beberapa metode penganggaran yang dikembangkan dalam pendekatan New Public Management antara lain:

- a. **Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting):** Merupakan pendekatan yang mengaitkan program kerja dengan indikator kinerja sebagai tolok ukur pencapaian tujuan organisasi sektor publik.
- b. **Zero-Based Budgeting (ZBB):** Merupakan metode penyusunan anggaran yang dimulai dari nol (tanpa mengacu pada anggaran tahun sebelumnya). Setiap unit kerja harus membuktikan kebutuhan anggaran secara rinci dan relevan dengan kondisi saat ini.
- c. **Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS):** Sistem anggaran berbasis program yang mengacu pada teori sistem dan berfokus pada keluaran (output) serta tujuan (outcome). Anggaran PPBS menyusun program dengan mengelompokkan aktivitas sesuai sasaran dan bertujuan membantu pengambil keputusan dalam menentukan alokasi sumber daya secara optimal.

2.6 Pentingnya Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik memegang peran krusial dalam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Fungsi utamanya adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar publik seperti penyediaan listrik, akses terhadap air bersih, layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, dan berbagai layanan sosial lainnya.

Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah menyusun dan mengelola anggarannya. Dalam sistem demokrasi, pemerintah bertindak atas nama rakyat, sehingga dana yang dikelola oleh negara sejatinya adalah milik publik. Oleh karena itu, anggaran publik mencerminkan rencana pemerintah dalam menggunakan dana masyarakat untuk kepentingan bersama.

Anggaran dapat dianggap sebagai cetak biru (blueprint) arah pembangunan suatu negara. Ia berfungsi sebagai panduan strategis yang menunjukkan prioritas dan visi pemerintah ke depan. Agar dapat berfungsi optimal, anggaran sektor publik harus memenuhi beberapa kriteria, seperti mampu menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat, serta

memberikan kejelasan terkait alokasi penerimaan dan pengeluaran di tingkat pusat maupun daerah.

Secara umum, pentingnya anggaran sektor publik dapat dijabarkan melalui beberapa poin berikut:

- a) Sebagai Instrumen Stabilitas Nasional: Anggaran menjadi alat bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, terutama dalam menghadapi gejolak eksternal maupun kondisi darurat.
- b) Menjembatani Kebutuhan dan Keterbatasan Sumber Daya: Dalam kondisi sumber daya yang terbatas, anggaran berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan antara keinginan masyarakat yang tak terbatas dengan kapasitas negara dalam memenuhinya. Ini berkaitan dengan prinsip ekonomi seperti keterbatasan (scarcity), pilihan (choice), dan pengorbanan alternatif (trade-offs).
- c) Mewujudkan Akuntabilitas Publik: Anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Dengan adanya anggaran yang transparan dan akuntabel, masyarakat dapat menilai sejauh mana lembaga-lembaga publik menjalankan tugas dan fungsinya secara bertanggung jawab.

Aanggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal

Dalam konteks kebijakan ekonomi, anggaran menjadi komponen utama dari kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan fiskal merujuk pada upaya pemerintah dalam mengarahkan perekonomian melalui pengaturan pengeluaran negara dan sistem perpajakan, guna mencapai tujuan tertentu seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, atau distribusi pendapatan yang lebih merata. Melalui anggaran, pemerintah dapat:

- a) Merespon perubahan kebutuhan dan aspirasi masyarakat
- b) Menentukan prioritas program serta alokasi sumber daya di berbagai tingkatan pemerintahan (nasional, provinsi, maupun daerah)
- c) Menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial
- d) Meningkatkan kualitas hidup warga negara.

Dengan demikian, anggaran sektor publik bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga merupakan alat strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Penganggaran sektor publik merupakan instrumen vital yang digunakan pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai program pembangunan. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, komunikasi, hingga alat penilaian kinerja. Dalam penyusunannya, anggaran harus memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, otorisasi legislatif, keutuhan, serta akurasi.

Terdapat dua pendekatan penyusunan anggaran, yaitu anggaran tradisional dan pendekatan *New Public Management* (NPM). Keduanya memiliki ciri khas masing-masing, namun pendekatan modern lebih menekankan efektivitas, efisiensi, serta orientasi pada kinerja. Dengan demikian, anggaran sektor publik bukan hanya dokumen administratif, melainkan cerminan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola uang rakyat untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

3.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang ada dalam makalah ini, penulis menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Selain itu, penting juga bagi aparat pemerintah untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan publik agar anggaran yang dibuat benar-benar tepat sasaran. Penulis juga berharap mahasiswa maupun masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya anggaran, sehingga fungsi anggaran sebagai alat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bisa berjalan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga*. Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrayani, M. Ak. 2022. *Modul Akuntansi Sektor Publik*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Mardiasmo, 2021. *Akuntansi Sektor Publik: Andi Offset*, Yogyakarta Halim & Kusufi 2012
- Majid, J. (2019). *Akuntansi sektor publik*. Gowa, Indonesia: Pusaka Almaida.
- Mardiasmo. 2021. *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sarsiti, V. Fransisca. 2020. *Akuntansi Sektor Publik*. Surakarta: UNSA Press.

STUDY KASUS

Dilansir pada website antaranews.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 1,34 triliun untuk Anggaran Tahun 2026. Pagu indikatif awal yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada KPK adalah sebesar Rp 878,04 miliar, yang seluruhnya dialokasikan hanya untuk program dukungan manajemen (gaji, tunjangan, operasional kantor). Pada pagu tersebut, tidak ada sama sekali alokasi untuk program pencegahan dan penindakan korupsi - padahal KPK memiliki kewenangan dan tugas di bidang tersebut yang membutuhkan dana khusus.

Dari total kebutuhan yang dihitung KPK, sejumlah Rp 856,6 miliar dari tambahan tersebut akan dipakai untuk program pencegahan & penindakan korupsi, sedangkan sisanya (sekitar Rp 491,3 miliar) untuk mendukung manajemen. KPK juga menyebut bahwa jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, beberapa program penting akan terhambat, termasuk kegiatan prioritas nasional, inisiatif strategis seperti pembangunan fasilitas pelatihan antikorupsi, dan peningkatan sistem teknologi informasi.

Pertanyaan: Bagaimana tambahan anggaran sebesar Rp 1,34 triliun ini bisa diukur mana yang efektif (manajemen vs tugas inti)? Apa indikator kinerja yang harus disiapkan agar publik bisa menilai bahwa dana tersebut digunakan secara ekonomis, efektif, dan efisien?